**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK**

1. **PENDAHULUAN**

# Bab kelima akan membahas mengenai konsep dan model implementasi kebijakan. Bab ini menjadi dasar untuk bab-bab berikutnya. Uraian bab ini berisi penjelasan tentang konsep implementasi kebijakan, proses implementasi kebijakan dan masalahnya, dan model-model implementasi kebijakan.

**Kompetensi Dasar**

Mampu memahami Implementasi Kebijakan Publik yang meliputi : konseptualisasi implementasi kebijakan, prosesnya dan model-model implementasi kebijakan

**Indikator**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan konseptualisasi implementasi kebijakan
2. Menjelaskan proses implementasi kebijakan
3. Mendeskripsikan dan menganalisis model-model implementasi kebijakan

**Tujuan Pembelajaran**

1. Mendapatkan konseptualisasi implementasi kebijakan.
2. Mendapatkan proses implementasi kebijakan
3. Mendapatkan cara menganalisis model-model kebijakan
4. **PENYAJIAN MATERI**
5. **Konseptualisasi Implementasi Kebijakan**

Sejarah implementasi diawali oleh studi Pressman dan Wildavsky pada tahun 1973 yang berjudul Impelementation **:** “*How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland, or Why it’s Amazing that Federal Program Work At All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as told by two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation of Ruined Hopes” .* kedua ahli itu mendapatkan hasil bahwa problem kebijakan banyak terjadi di level implementasi ketimbang formulasi.

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle (1980: 7), bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (2006: 461) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi juga dikemukakan oleh Lane (dalam Akib,2010) bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu (Sabatier, 1986: 21-48). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (dalam Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan

Studi implementasi kebijakan dibagi dalam 3 generasi dengan focus kajian yang berbeda-beda. *Generasi perta*ma diwakili oleh studi Pressman dan Wildavsky yang terfokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Hasilnya member pengakuan sifat atau kakikat implementasi yang kompleks. *Generasi kedua* terfokus pada deteminan keberhasilan implementasi kebijakan. Model konseptual model proses implementasi dikembangkan dan diuji pada berbagai area yang berbeda. Dua pendekatan yang mendominasi adalah pendekatan *top-down* dan pendekatan *topdown.* Studi yang representatif pada masa ini dibuat oleh Carl Van Horn dan Donald, Van Meter serta Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. *Generasi ketiga* terfokus pada sintesis dan pengembangan pendekatan implementasi kebijakan dengan lokus (secara multilevel) dan focus yang lebih kompleks sebagai proses dinamis.

Ada beberapa alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan. Mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retoris tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang kebijakan.

T. B. Smith mengakui bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program – secara garis besar – dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

1. **Proses Implementasi Kebijakan**

Proses implementasi dipahami sebagai pengelolaan hukum (karena kebijakan telah disyahkan dalam bentuk hukum), dengan mengerahkan semua sumberdaya yang ada, agar kebijakan mampu mencapai dan mewujudkan tujuannya. Berbagai fakta menunjukkan bahwa, didalam implementasi terkandung proses yang kompleks dan panjang. Proses implementasi sendiri bermula sejak kebijakan ditetapkan dan memiliki payung hukum yang syah. Setelah itu tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan, mulai dari membentuk organisasi, mengerahkan orang, sumberdaya, teknologi, menetapkan prosedur, agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

Bagi penulis, implementasi dipahami sebagai kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

**Gambar 5.1.**

**Implementasi Sebagai Delivery Mechanism Policy Output**

**Gambar 5.2.**

**Perubahan Kondisi kelompok sasaran yang menggambarkan tujuan Implementasi**

Tahapan implementasi sebagai “proses” dikatakan sebagai “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita. ***Dunia konsep*** tercermin dari kondisi ideal yang dicita-citakan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan. Sementara dunia nyata adalah realitas dimana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan sedang bergelut dengan berbagai persoalan social, ekonomi dan politik. Implementasi dikatakan sebagai jembatan, karena melalui tahapan yang dilakukan oleh “*delivery mechanism”*, yaitu ketika berbagai *policy out*put yang dikonversi dari *policy input* disampaikan kepada kelompok sasaran

Gambaran proses implementasi dimulai dari penjelasan sebagai berikut : bahwasanya sebuah kebijakan disusun untuk mencapai misi, mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan. Untuk k mencapainya maka diperlukan policy input, salah satunya anggaran. Input berupa anggaran dari pemerintah akan diolah atau dikonversi menjadi keluaran kebijakan (policy output).

*Policy Output* merupakan instrument kebijakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Policy output dapat berupa : (1) Pelayanan gratis, yang diberikan oleh pemerintah, misalnya : pendidikan, kesehatan, air bersih. (2). Hibah kepada masyarakat, berupa peralatan pertanian, computer pada siswa SD, kendaraan operasional utk rumah sakit, penelitian dan pengabdian untuk para pengajar. (3) Susidi, contohnya bibit, nahan bakar, alat kontrasepsi. (4). Transfer dana, misalnya bantuan tunai yang diberikan pemerintah kepada keluarga miskin agar mereka mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka. *Policy output* sebagai instrument kebijakan tidak akan sampai pada kelompok sasaran tanpa dilakukannya kegiatan menghantarkan *policy output* tersebut. Kegiatan menghantarkan *policy output* kepada kelompok sasaran menjadi tugas *implementing agency* (lembaga yang diberi tugas untuk mengimplementasikan kebijakan).

Untuk menjamin implementasi dapat berjalan lancar, sebelum kegiatan penyampaian keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dimulai terlebih dahulu dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran berupa sosialisasi atau konsultasi public. Informasi mencakup : 1) penjelasan secara lengkap tentang tujuan kebijakan 2) manfaat dan keuntungan yang akan dirasakan oleh kelompok sasaran 3) stakeholders yang terlibat 4) mekanisme sebuah kebijakan/program. Setelah proses sosialisasi/konsultasi public, maka kegiatan *delivery activities* dilakukan, yaitu kegiatan untuk menyampaikan policy output kepada kelompok sasaran. Inilah yang banyak dipahami sebagai kegiatan implementasi kebijakan.

Tujuan *delivery activities* adalah sampainya *policy output* pada kelompok sasaran, yang realisasinya bisa berbagai bentuk, misalnya pemberian pelayanan (seringkali gratis), maupun realisasi bantuan (Misalnya kompor gas, traktor, mesin jahit, dana penelitian dan pengabdian). Dengan demikian, *delivery activities* dinilai berhasil, apabila pelayanan, hibab, subsidi dan lainnya sampai atau diterima oleh kelompok sasaran. Kriteria yang diterapkan biasanya yaitu ; 1) tepat waktu penyampaian 2) tepat kuantitas 3) tepat kualitas 4) tepat sasaran.

Ketika *policy output* sudah sampai pada kelompok sasaran, maka dikatakan kebijakan telah menimbulkan *policy effect*  atau *initial outcome*, yaitu dampak langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran ketika ada kegiatan *delivery activities* suatu *policy output* kepada kelompok sasaran. Contoh kebijakan pemerintah memberikan traktor tangan/hibah penelitian, maka *policy effect* muncul saat diterimanya traktor/penelitian. Kualitas *policy effect* yang baik adalah ketika seluruh kelompok sasaran yang *eligible* (memenuhi criteria) memperoleh traktor tangan/dana penelitian, sehingga *policy effect* yang baik dinilai dari cakupan (*coverage*) kelompok sasaran.

Tahap berikutnya setelah kelompok sasaran menerima *policy output* adalah dimanfaatkannya bantuan tersebut untuk kegiatan yang menunjang kehidupan utama kelompok sasaran. Sebagai gambaran, dengan diterimanya setelah diterimanya traktor, maka pengolahan lahan pertanian jauh lebih baik, sehingga produktivitas pertanian meningkat, akhirnya pendapatan meningkat, yang ujung-ujungnya maka kesejahteraan diri dan keluarga meningkat. Peningkatan kesejahteraan petani tersebut disebut sebagai dampak kebijakan/program. *Policy impact* dan *policy effect* disebut dengan *policy outcomes* (hasil kebijakan). *Policy outcomes* (hasil kebijakan) kemudian dibandingkan dengan tujuan kebijakan (*goal policy*). Apabila *policy outcomes* mampu mewujudkan tujuan kebijakan (*goal policy*), maka bisa dikatakan terjadi kinerja kebijakan (*policy performance*) .

1. **Model-Model Implementasi**

Implementasi kebijakan banyak dipengaruhi oleh cabang ilmu pengetahuan. Salah satu pengaruh yang besar adalah manajemen, yang berasal dan dikembangkan sektor bisnis. Beberapa model-model implementasi sebagaimana diuraikan oleh Nugroho (2012: 683-698)

**Model Van Meter dan Van Horn**

Merupakan moodel yang paling klasik, yakni model yang mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variable yang dimasukkan sebagai variable yang memengaruhi kebijakan publik adalah variable berikut : (1). Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi; (2). Karakteristik agen pelaksana/implementor; (3). Kondisi ekonomi,social,dan politik; (4). Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor.

**Model mazmanian dan Sabatier**

Model yang dikembangkan Daniel mazmanian dan paul A. Sabatier (1983) mengemukakan, bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan, dikatakan *”implementation is the carrying out of basic policy decision,usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executives ordes or court decision. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be pursued, and in a vaiety of ways, ‘structures’ the the implementation process.*” . Model ini merupakan kerangka analisis implementasi (*A framework for implementation analysis*) yang mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variable, yakni :

*Pertama :*  variable independen, yaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

*Kedua,* variable intervening, yaitu variable kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indicator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kasual, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variable diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

*Ketiga,* variable dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana,kepatuhan objek,hasil nyata,penerimaan atas hasil nyata tersebut,dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

**Model Hogwood dan Gunn**

Model brian W. hogwood dan lewis A. gunn (1978) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan beberapa syarat. *Syarat pertama* berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar. *Syarat kedua* adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai,termasuk sumber daya waktu. Gagasan ini sangat bijaksana karena berkenaan dengan fisibilitas implementasi kebijakan. *Syarat ketiga,* apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut impak yang luas. Oleh Karena itu ,implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber yang diperlukan,baik dalam konteks sumber daya maupun sumber-aktor. *Syarat keempat*, adalah apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal. Jadi, prinsipnya adalah apakah kebijakan tersebut memang dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi.dalam metodologi dapat disederhanakan menjadi “apakah jika X dilakukan akan terjadi Y”. *Syarat kelima* adalah, beberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan “sebab-akibat”, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai. Sebuah kebijakan yang mempunyai hubungan kausalitas yang kompleks otomatis menurunkan efektivitas implementasi kebijakan. *Syarat keenam*, adalah apakah hubungan saling kebergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling kebergantungan tinggi, implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif-apalagi jika hubungannya adalah hubungan kebergantungan. *Syarat ketujuh* adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan . tidak lah begitu sulit dipahami,bahwa mereka yang ada dalam perahu yang sama sepakat akan sebuah tujuan yang sama. *Syarat kedelapan* adalah, bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan. *Syarat kesembilan* adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergi. *Syarat kesepuluh* adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan atau power adalah syarat bagi keefektivan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan,kenijakan akan tetap berupa kebijakan-tanpa ada impak bagi targer kebijakan. Model ini mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok. Kelemahannya, konsep ini tidak secara tegas menunjukan mana yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau operasional.

**Model Grindle**

Model ini menggambarkan bahwa implementasi ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut : (1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan; (3) Derajat perubahan yang diinginkan; (4) Kedudukan pembuat kebijakan; (5) Siapa pelaksana program; (6) Sumberdaya yang dikerahkan. Sementara itu,konteks implementasinya adalah: (1) Kekuasaan, kepentingan,dan strategi aktor yang terlibat; (2) Karakteristik lembaga dan penguasa; (3) Kepatuhan dan daya tanggap. Keunikan model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasim dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para actor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

**Model Edward III**

Model ini menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah “*lack of attention to implementation”.* Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Ada 4 isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu : *communication*, *resource*, *disposition* *or attitudes* dan *bureaucratic structures. Komunikasi* berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. *Resource* berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumberdaya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. *Disposition* berkenaan dengan ketersediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijaka. *Struktur birokrasi* berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

1. **RANGKUMAN**

Konsepsional implementasi adalah proses umum tindakan administratif y ang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi hakikinya baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Proses implementasi sendiri bermula sejak kebijakan ditetapkan dan memiliki payung hukum yang syah. Setelah itu tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan, mulai dari membentuk organisasi, mengerahkan orang, sumberdaya, teknologi, menetapkan prosedur, agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

Implementasi dipahami sebagai kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Beberapa model implementasi kebijakan diantaranya : 1) Model Edward III, 2) Model Grindle, 3) Model Hogwood dan Gunn, 4) Model mazmanian dan Sabatier, 5) Model Van Meter dan Van Horn

1. **LATIHAN**
2. Jelaskan konsepsional dari implementasi kebijakan public.
3. Mengapa implementasi kebijakan dianggap sebagai aktivitas yang penting dan menentukan keberhasilan kebijakan keseluruhan.
4. Apa yang dimaksud dengan *delivery mechanism, policy input, policy output, implementing agency, target group, policy goal, policy effect* dan *policy outcome.*
5. Gambarkan proses implementasi kebijakan dan analisis titik kelemahan dari implementasi kebijakan dalam keseluruhan prosesnya.
6. Jelaskan model Edwar III, model Jaringan, model Van Meter Van Horn dalam implementasi kebijakan.
7. Deskripsikan titik tekan masing-masing model implementasi.
8. **RUJUKAN**

Goggin, Malcolm L *et al*. 1990. ***Implementation, Theory and Practice****,* Scott, Foresmann and Company, USA.

Grindle, Merilee S. 1980. ***Politics and Policy Implementation in The Third World***, Princnton University Press, New Jersey.

Korten, David C dan Syahrir. 1980. ***Pembangunan Berdimensi Kerakyatan***, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. ***The Politics of Policy Implementation*,** St. Martin Press, New York.

Edward III, George C (edited), 1984, ***Public Policy Implementing***, Jai Press Inc, London-England.

Korten, David C dan Syahrir. 1980. ***Pembangunan Berdimensi Kerakyatan***, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. ***Implementation and Public Policy****,* Scott Foresman and Company, USA.

Nugroho,Riant.2012. ***Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan,Manajemen Kebijakan*** . Elex Media Komputindo.Jakarta

Quade, E.S. 1984. ***Analysis For Public Decisions***, Elsevier Science Publishers, New York.

Parson,Wayne.2006. Public Policy : ***Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan***. Kencana. Jakarta

Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy* ***Implementation and Bureaucracy*,** second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.

Wahab, Solichin A. 1997. ***Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*,** Bumi Aksara Jakarta.

Wibawa, Samodra. 1994. ***Kebijakan Publik***, Intermedia Jakarta.

Wahab,Solichin. 1997. ***Analisis Kebijaksanaa: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.*** Bumi Aksara. Jakarta

1. **GLOSSARI**

***Variabel dependen dalam implementasi*** : Sesuatu yang menjadi penyebab dari keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

***Variabel independen dalam implem***entasi : Sesuatu yang timbul sebagai akobat dari penyebab utama dari kegagalan/keberhasilan implementasi kebijakan

***Kinerja Implementasi*** : Capaian hasil kebijakan yang diperoleh dengan membandingkan antara tujuan kebijakan dengan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan.